

INTISARI

Penelitian ini menjelaskan tentang konflik rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa, Bali. Perbedaan cara pandang masyarakat dan pemerintah membuat rencana reklamasi tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan berasal dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) yang telah melakukan advokasi selama hampir 5 tahun lamanya karena menganggap reklamasi akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan pesisir Selatan Pulau Bali. Terlebih, kawasan yang akan direklamasi merupakan kawasan suci bagi umat Hindu yang tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat strategi advokasi yang digunakan oleh ForBALI sejalan atau tidak dengan kepentingan publik. Advokasi yang dilakukan oleh ForBALI selama ini telah berhasil mengangkat isu reklamasi ini menjadi isu nasional. Hal yang menarik dilakukan oleh ForBALI yaitu strategi advokasi yang dijalankan selama ini sangat mengedepankan adat dan budaya Bali dalam setiap aksi demonstrasi dan proses advokasi yang dilakukan. Adat dan budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali dijadikan sebagai salah satu *tools* untuk menentang kebijakan reklamasi yang direncanakan oleh pemerintah dan investor. Aksi-aksi seperti pemakaian busana adat madya, menampilkan kebudayaan Bali, musyawarah adat, upacara adat, dan berbagai aksi serta simbol lainnya yang digunakan sebagai bentuk protes masyarakat. Selain itu juga ForBALI melakukan aksi lobby dan negosiasi dengan para pembuat kebijakan. Selama ini, advokasi yang dilakukan sangat konsisten untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang dibantu oleh berbagai elemen masyarakat dan jaringan luas, termasuk masyarakat desa adat juga ikut tergabung sebagai pihak yang wilayahnya akan terkena dampak langsung dari adanya reklamasi tersebut. Ada juga keterlibatan dari para seniman dan musisi yang juga memperoleh ruang untuk menolak reklamasi dengan cara mereka masing-masing. Dari sekian banyak strategi yang dilakukan, penelitian ini juga menjabarkan kesesuaian strategi advokasi yang telah dilakukan oleh ForBALI selama ini dalam merepresentasikan kepentingan publik.

Keyword: reklamasi, advokasi, adat dan budaya, kepentingan publik

ABSTRACT

This research explains about conflict of reclamation planning in Teluk Benoa region, Bali. The differences between people and government regarding perspective made the reclamation planning was resisted by the people. The denial came from Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) which has been resisting for 5 years. According from ForBALI, reclamation of Teluk Benoa is harmful for the environment of South Bali coastal area. Even more the region where the reclamation is being targeted is a sacred region for Hindu people and cannot be used carelessly. The method used in this research is qualitative method with case study approach to see strategy used by ForBALI, appropriate or not with public interest. Advocacy from ForBALI up to this point was success to bring up the reclamation issue became a national issue. The interesting thing which has done by ForBALI was cultural and custom based advocacy strategy in every demonstration and advocacy process. Custom and culture that is consistently held by Balinese people is tools to resist reclamation policy from government and investor. The actions such as wearing traditional fashion, showing Balinese culture, custom forum, custom ceremony, and another actions is described as a protest by people. Furthermore, ForBALI also make a lobby and negotiation with the policy maker. Up to this point, advocacy which was consistently done by every elements of society, including traditional village who joined as a party who is directly impacted by the reclamation. There are also involvement of protest from musician and artist who resist the reclamation by their own way. This research also discuss about partiality of advocacy strategy which has done by ForBALI.

Keywords: reclamation, advocacy, custom and culture, public interest